

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk menguji mekanisme *corporate governance* (kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisari dan efektifitas komite audit) terhadap pemilihan audit eksternal perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian serta dalam penelitian juga melakukan studi *komparatif* mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal antara industri keuangan dengan industri non-keuangan yang *listing* di BEI.

Mengikuti penelitian yang sebelumnya oleh Lin and Liu (2009) yang menunjukkan bahwa auditor besar lebih mampu menyakinkan investor dalam penawaran perdana dalam kegiatan berinvestasi. Selain itu menurunnya mekanisme *corporate governance* perusahaan akan lebih cenderung menolak untuk memilih auditor yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian Markali dan Rudiawardani (2012) menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme *corporate governance* yang baik memungkinkan manajemen memilih auditor yang berkualitas untuk perusahaannya, dan begitupun sebaliknya. Ashbaugh and

Warfield (2003) menunjukkan hasil penelitian di pasar Jerman yaitu perusahaan lebih cenderung untuk menyewa auditor yang bereputasi ketika perusahaan memiliki kepentingan untuk kredit, pemegang saham dan pemasok dari pihak asing. Serta perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh keluarga lebih cenderung memilih auditor yang bereputasi di Jerman. Artinya bahwa auditor memainkan peran penting dalam penerapan mekanisme *corporate governance* ketika perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang handal untuk *stakeholders* perusahaan.

Survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara Asia terburuk kedua dalam sistem birokrasi. Survei itu akan menjadi cermin bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.” Survei PERC itu dapat mencerminkan pandangan para pebisnis tentang birokrasi di Indonesia,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Boediono dalam Nugroho (2011).

PERC yang bermarkas di Hong Kong meranking negara-negara di Asia dalam hal birokrasi dimana nilai 10 merupakan nilai terburuk. Urutan pertama adalah India (9,41), Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), China (7,93), Malaysia (6,97), Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Menurut penelitian boot-Allen & Hamilton, seperti dikutip Irwan (2000), Huther and Shah (2000), dan Sri Y. Susilo (2000) Rendahnya indeks *good governance* di Indonesia didukung oleh hasil studi Huther dan Shah (1998) yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori negara *poor governance*. Banyaknya skandal manipulasi melibatkan beberapa perusahaan besar yang dahulunya

mempunyai kualitas audit yang tinggi di Indonesia seperti PT. Lippo Tbk, Bank Bali dan PT. Kimia Farina, Tbk yang melibatkan pihak eksternal maupun internal perusahaan untuk melakukan manipulasi pelaporan keuangan (Gideon, 2005).

Banyaknya kasus manipulasi yang melibatkan *Chief Excektif Officer* (CEO), komisaris, komite audit, internal dan eksternal audit dalam melakukan kecurangan akuntansi akan menyebabkan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan yang sering ditandai dengan adanya penurunan harga saham perusahaan (Susiana dan Herawaty, 2007). Hal tersebut terjadi karena adanya rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah *earning manajement* yang sejalan dengan munculnya teori agensi (*agensi theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha. Adanya kepentingan antara *principles* dan *agents* memunculkan adanya konflik kepentingan yang dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan didalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga baik *shareholders* (Mark et al, 1998).

Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan perekonomian negara, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk mempunyai mekanisme *corporate governance* yang baik. Peran auditor eksternal dalam mekanisme *corporate governance* sangatlah penting yaitu sebagai pengawas dalam proses laporan keuangan perusahaan (Ashbaugh dan Warfield, 2003). Artinya bahwa dengan adanya mekanisme *corporate governance* dan pemilihan

auditor eksternal *top ten* berkualitas akan mengarahkan manajemen perusahaan untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Adanya keberadaan dari auditor eksternal membawa pengaruh atas pengelolaan mekanisme *corporate government* (Lin dan Liu, 2009) sehingga penggunaan jasa auditor eksternal untuk audit atas laporan keuangan yang di publikasi oleh perusahaan biasanya perusahaan harus mengambil *trade-off* dalam keputusan pemilihan auditor perusahaan mereka, yaitu untuk menyewa auditor berkualitas tinggi maka akan memiliki sinyal pemantauan audit yang efektif dan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan cenderung menurunkan modal dan menaikkan biaya serta memberikan keuntungan bagi pengguna informasi karena pengungkapan yang lebih transparan, atau untuk memilih auditor berkualitas rendah maka audit akan kurang efektif untuk menuai keuntungan pribadi yang diperoleh perusahaan dan kurang transparan dalam pengungkapan perusahaan dengan tata kelola mekanisme internal yang lemah cenderung memilih auditor dengan kualitas yang rendah, hal ini dilakukan agar melalui lemahnya transparansi keuangan perusahaan. Disisi lain, dengan perbaikan tata kelola perusahaan, perusahaan akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menunjuk auditor yang besar dengan asumsi mereka mampu memberikan kualitas audit yang tinggi (Lin and Liu, 2009).

Banyaknya kantor akuntan publik di Indonesia memungkinkan adanya kualitas audit yang berbeda karena kualitas audit merupakan faktor yang sulit diukur secara langsung. Menurut De Angelo (1981) dan Palmrose (1988) ada proksi yang

biasa digunakan dalam mengukur kualitas audit yaitu dengan melihat ukuran dari kantor akuntan publik yang dilihat dari tingkat pendapatan yang diperolehnya.

Ada empat mekanisme *corporate government* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate government* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu komisaris independen, efektifitas komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Maharani (2012), Balafif (2010), Asbaugh et al (2003), dan Wardhani (2006)). Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Siregar, 2005).

Selain dewan komisaris independen, intensitas pertemuan dewan komisaris serta ukuran dewan. Komisaris (*board size*) turut berperan penting dalam penerapan *Corporate Government*. Beasley (1996) dalam Yatim et al (2006) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula kemungkinan adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dan sebaliknya.

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite perusahaan. Komite yang umumnya dibentuk adalah komite

kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, komite nominasi dan komite audit. Berdasarkan Surat keputusan ketua BAPEPAM KEP41/PM/2003, SK. Dir. BEJ Nomor: 315/BEJ,106-2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117 Tahun 2000 dan Undang – Undang BUMN Nomor: 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit memegang peran penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggungjawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, sistem manajemen resiko serta fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit berfungsi sebagai mediator dalam berkomunikasi antar dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

Lin dan Liu (2009) melakukan penelitian dalam hal mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal dengan hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan dengan pemegang saham yang lebih besar atau CEO dan ketua dewan komisaris dengan orang yang sama maka akan kecil kemungkinan untuk menyewa 10 top auditor di China. Sehingga lemahnya perusahaan dalam memilih auditor yang berkualitas karna kurangnya manfaat yang ada dalam mekanisme *corporate governance* diperusahaan tersebut.

Cheng (2009) melakukan penelitian mengenai pemilihan auditor yang mempengaruhi manajemen dalam tata kelola perusahaan baik secara eksternal maupun internal yang berkaitan dengan manajemen laba (studi negara China) dengan hasil bahwa auditor dengan berkualitas tinggi menyediakan mekanisme

*corporate governance* yang lebih signifikan karena adanya pengaruh demografi dan karakteristik dalam manajemen tata kelola perusahaan sehingga mempengaruhi pemilihan auditor. Dengan adanya CEO yang memiliki sertifikasi akademik dan profesional maka CEO cenderung memilih auditor yang berkualitas tinggi bagi perusahaannya.

Markali (2012) melakukan penelitian hubungan mekanisme *corporate governance* dengan pemilihan auditor pada badan usaha sektor keuangan *go public*. Adapun hasil penelitian menyatakan bahwa jika mekanisme internal *corporate governance* baik maka akan menyebabkan kecenderungan bagi perusahaan untuk memilih auditor yang berkualitas tinggi.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran kepemilikan saham institusional, ukuran kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan efektifitas komite audit terhadap, pemilihan auditor eksternal menggunakan metode penetapan skor efektifitas komite audit yang dikembangkan oleh Hermawan dalam Maharani (2012). Proksi dalam pemilihan auditor eksternal menggunakan *revenue* setiap KAP di Indonesia yang diperoleh dari Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilaian (PPAJP) Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang diranking menggunakan jumlah pendapatan Jasa profesional selama tahun pengamatan untuk masuk kedalam *top ten* Auditor Eksternal. Penelitian ini juga melakukan uji komparatif antara perusahaan industri yang menerapkan mekanisme *corporate governance* pada industri keuangan dan non-keuangan.

Maharani (2012) memasukkan beberapa variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan *leverage*. Pentingnya variabel kontrol yang dimasukkan ke dalam model penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris sejauh mana variabel kontrol tersebut dapat mempengaruhi mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan seberapa besar informasi yang terdapat didalamnya, serta mencerminkan kesadaran maupun pihak internal perusahaan. Sedangkan rasio hutang terhadap modal (*leverage*) adalah ukuran penting untuk menunjukkan apakah perusahaan tergolong *financial* (Nairn et al, 2000).

Kontribusi penelitian ini sangatlah penting karena dapat dijadikan sebagai perlindungan, terhadap pengguna informasi mengenai perusahaan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan tahunan sehingga tingkat keandalan yang dapat dipercaya sangat tinggi dengan cara menggunakan jasa audit yang berfungsi sebagai pengawasan serta menguji kredibilitas dari informasi akuntansi yang disediakan oleh manajemen (Asbaugh & Warfield, 2003).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah mekanisme *corporate governance* berpengaruh positif terhadap pemilihan auditor eksternal yang bereputasi?
2. Manakah yang lebih efektif penerapan mekanisme *corporate governance* dalam pemilihan auditor eksternal untuk perusahaan keuangan dan non –

keuangan?

Adapun mekanisme *corporate governance* diproksikan dalam kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris dan efektifitas komite audit.

### **1.3. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penulis membatasi penelitian pada mekanisme *corporate governance* (kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisaris dan efektifitas komite audit) dan pemilihan auditor eksternal yang bereputasi untuk industri keuangan dan non-keuangan.

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan audit eksternal yang bereputasi (studi empiris pada perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia)
- b. Untuk melakukan uji komparatif mengenai mekanisme *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal pada spesialisasi industri keuangan dan non-keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi regulator, praktisi atau pemerintah yaitu memberikan bukti empiris dalam hal menambah pemahaman tentang keterkaitan *corporate*

*governance* serta pemilihan audit eksternal dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance* dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat bisnis sehingga memberikan kontribusi informasi yang valid yaitu berupa laporan keuangan bagi pelaku bisnis.

- b. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan mekanisme *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal sehingga diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Selain itu penerapan mekanisme *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.
- c. Bagi para peneliti dan akademisi dalam menjawab pertanyaan apakah secara empiris terdapat pengaruh mekanismes *corporate governance* terhadap pemilihan audit eksternal.
- d. Bagi perkembangan ilmu akuntansi, sebagai suatu bahan kajian dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya, yang tertarik untuk menelaah kualitas *corporate governance* yang berkaitan dengan pemilihan audit eksternal.